

Budisan's Blog

Saat ini KPK boleh merasa lega setelah 'pelimpahan berkas kasus BG ke Kejaksaan' dibayar Polri dengan 'pemberhentian proses hukum Pimpinan KPK non-aktif dan pegawai KPK' (untuk sementara?). KPK hidup normal lagi. Penyelesaian tunggakan 36 kasus (target 2015) mengalami percepatan. Polri berharap kasus BG bisa di-SP3-kan secepatnya. Sementara KPK berharap 'keengganan MA untuk menguji Putusan Sarpin' bisa segera dituntaskan melalui Putusan MK. Let's see, "Apa yg terjadi Pascaputusan MK nanti?"

Tampilkan posting dengan label **Pembangunan Pesisir Jakarta**. [Tampilkan semua posting](#)

SELASA, 25 NOVEMBER 2014

[Mencari Rumusan Pembangunan Pesisir Jakarta](#)

Mencari Rumusan Pembangunan Pesisir Jakarta

Etty Riani ; *Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, FPIK, IPB*

KOMPAS, 24 November 2014

PEMBANGUNAN Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi telah melesat jauh meninggalkan semua kota di Indonesia. Seperti pepatah "ada gula ada semut", Jakarta menjadi magnet luar biasa yang menyedot orang-orang datang. Bahkan, dalam kondisi yang sangat melarat pun mereka akan bertahan di Jakarta.

Jumlah penduduk yang membeludak membuat Jakarta semakin tidak nyaman karena jumlah sarana dan prasarana semakin tidak memadai. Pencemaran terjadi di mana-mana, ditambah pencemaran hasil berbagai kegiatan sepanjang daerah aliran sungai yang masuk ke wilayah DKI Jakarta melalui 13 sungai. Belum lagi hilangnya ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru (danau, situ, embung), intrusi air laut, dan berbagai kekacauan tata guna lahan lainnya.

Maka, pelan tapi pasti, permukaan tanah di Jakarta semakin turun di sejumlah titik di Jakarta. Jika dibiarkan, Jakarta akan tinggal kenangan, tergenang oleh air dari hulu dan rob dari laut. Oleh karena itu muncul pemikiran membangun *giant sea wall* (tanggul laut) untuk melanggengkan DKI Jakarta. Namun, pembangunan tanggul laut yang diperluas menjadi Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) dapat memunculkan masalah baru jika tidak ditangani dengan sangat hati-hati dan tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tidak mudah

Pembangunan NCICD tentu tidak sapu jagat. Menghadang banjir dari laut dan dari hulu dengan tanggul laut secara parsial mungkin bisa. Namun, ketika berubah menjadi NCICD, belum tentu masalah terselesaikan. Memang tidak semudah membalik tangan karena di balik proyek raksasa dengan pembangunan yang masif, pasti ada dampak negatifnya. Pembangunan NCICD bagai makan buah simalakama, tidak dilakukan mungkin Jakarta tenggelam dan dilakukan mungkin menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang berkepanjangan.

MENGENAI SAYA



Budi Santoso

[Ikuti](#) 939

[Lihat profil lengkapku](#)

[CARI \(OPINI \) DI BLOG INI \(LIHAT/ SEARCH JUGA INDEKS DI BAWAH\)](#)

Cari

CD OPINI

[Anda Ingin Memilikinya?](#)

OPINI TERKINI

- [Pilkada dan Perempuan \(Dini Mentari\)](#)
- [Distribusi Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadan \(Khudori\)](#)
- [Orang-orang Dalam Kredo \(Mochtar Pabottingi\)](#)
- [Pembangunan Infrastruktur Gas \(Marwan Batubara\)](#)
- [Pilkada dan Uang Survei Kepala Daerah \(Asrinaldi Asril\)](#)
- [Tahun Pembinaan Pajak \(Yustinus Prastowo\)](#)
- [Pengungsi dan Kemanusiaan Kita \(Husni Mubarak\)](#)
- [Lagu Anak \(Purnawan Andra\)](#)
- [Surabaya dan Keberagaman \(Endang Suryadinata\)](#)
- [Transmisi Radikalisme Agama \(Dirga Maulana\)](#)
- [Sepak Bola dan Tata Kelola Dunia \(Dinna Wisnu\)](#)
- [Pancasila sebagai Pandangan Hidup \(Sudjito\)](#)
- [Meningkatkan Harkat Petani \(Ali Masykur Musa\)](#)
- [Tax Amnesty : Solusi Melalui Rekonsiliasi \(Mukhamad Misbakhun\)](#)
- [Perempuan Pantas Menjadi Panisel KPK \(Titi Fitrianita\)](#)
- [Inklusivitas Pendidikan Tinggi \(Moh Nashih\)](#)
- [Bangga Sesama Second Generation \(Azrul Ananda\)](#)
- [Pancasila dan Perspektif Islam Nusantara \(Syiafullah Yusuf\)](#)
- [KPK dan Memburainya Perang Melawan Elite Fasis \(Max Regus\)](#)
- [Simbiosis Ijazah Palsu \(Nanang Martono\)](#)
- [Beban Politik TVRI-RRI \(Agus Sudibyo\)](#)
- [Anomali Demokrasi \(Yasraf Amir Piliang\)](#)
- [Sekolah NU \(Asmadji As Muchtar\)](#)
- [Pengangguran Terdidik dan Radikalisme](#)

Sebagai penganut konsep pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia perlu memaksimalkan manfaatnya pada aspek sosial dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, sangat wajar jika banyak yang mempertanyakan dokumen lingkungan yang hingga saat ini belum kunjung ada (*Kompas*, 11/10/2014).

Bisa jadi DKI akan kedodoran menghadapi pembangunan sosial karena masalah sosial yang dihadapi masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional (*one day fishing*), cukup pelik. NCICD akan sangat menyulitkan kegiatan nelayan menangkap ikan karena mereka harus direlokasi dan kehilangan *fishing ground*. Relokasi juga tidak mudah karena di hampir semua wilayah pesisir sudah terdapat banyak nelayan sehingga berpotensi memunculkan konflik.

Tawaran untuk alih fungsi profesi juga tidak mungkin dilakukan mengingat nelayan DKI Jakarta dengan pendidikan sangat rendah (rata-rata tidak lulus SD) tidak mempunyai kompetensi lain, selain menangkap ikan. Padahal, nelayan DKI adalah tulang punggung keluarga sehingga jika kegiatan melaut hilang, periuk nasi keluarga juga hancur berantakan. Dampaknya adalah kerawanan sosial.

Awal pembangunan NCICD diduga akan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar mengingat banyaknya bangunan dan lahan yang digusur. Sebut saja Pelabuhan Muara Baru yang di dalamnya sarat dengan kegiatan ekonomi, mulai dari pedagang kelas teri hingga eksportir, mulai dari industri rumahan hingga industri besar, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja berdas. Semua tumpuk di lokasi tersebut.

Pembangunan NCICD juga akan melumpuhkan kegiatan ekonomi pesisir. Oleh karena itu, pembangunan NCICD harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek secara detail dan teliti, dengan meninggalkan egoisme sektoral, melibatkan semua kementerian, semua *stakeholder* dan *shareholder*, tanpa ada yang terlewat. Sekali lagi, proyek raksasa ini perlu ditimbang ulang agar tidak sekadar menjadi buah simalakama, tetapi juga merupakan implementasi pembangunan berkelanjutan dan sekaligus mengimplementasikan konsep *blue economy* yang memperhatikan lingkungan seperti keinginan Jokowi, sekaligus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, investasi, dan sistem produksi bersih, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan adanya kemakmuran yang berkeadilan.

Masalah lingkungan

Pembangunan NCICD juga akan memunculkan masalah lingkungan yang cukup pelik karena akan banyak ekosistem yang menjadi korban, seperti hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Padahal, ketiga ekosistem tersebut penentu produksi perikanan karena berperan sebagai spawning ground, nursery ground, dan feeding ground. Kehilangan itu semua akan berdampak pada sangat berkurangnya hasil tangkapan nelayan.

Mangrove dan lamun juga merupakan penangkap karbon yang andal melebihi hutan darat sehingga kehilangannya dapat membuat pemerintah tidak mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen tanpa bantuan asing. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Di antaranya merelokasi nelayan tradisional ke tempat baru yang tidak berpotensi konflik, memperhitungkan daya dukung lahan dan lingkungan serta kecukupan sarana dan prasarana nelayan, membuat *fishing ground* baru dengan memasang rumpun, menanam mangrove, lamun, dan transplantasi karang, selain juga mempertahankan wilayah-wilayah *spawning ground*, *nursery ground*, dan *feeding ground* yang sudah ada. •

Diposkan oleh Budi Santoso di 21.29 0 komentar

(Zuly Qodir)
 Kelokalan dan Keindonesiaan (Yenny Wahid)
 Permalukan RRT secara Internasional (Rene L. Pattiradjawane)
 Memahami Posmodernisasi Pancasila (Sarjuni)
 Pesantren Islam Nusantara (Munawir Aziz)
 Peneguhan Peran Ormas Islam (Singgih Tri Sulistyono)
 Menanti Aksi FBI di Senayan (B Indra K)
 Merajut Masyarakat Pancasila (Agus Maimun)
 Sabar untuk Sulitnya Menerima Kekalahan (Dahlan Iskan)
 Menanti Lahirnya "Kiai Langit" (Ahmad Dimiyati)
 Akankah Lusi Jadi Penyelamat Lingkungan (Januarti Jaya Ekaputri)
 FIFA, Gangster, dan Korupsi (Djoko Susilo)
 Ketika KPK Berada di Tubir Jurang (Saldi Isra)
 Urgensi Memperluas Akses PAUD (Tatang Muttaqin)
 Dari Sukma untuk Indonesia (Ahmad Baedowi)
 Rekonstruksi Sejarah Pancasila (Faisal Ismail)
 Urgensi Radikalisasi Pancasila (Ma'mun Murod Al-Barbasy)
 Cicak Sekecil Itu pun Dimusuhi (Mohamad Sobary)
 Ekonomi 2015, Ekspansi Terbatas (Firmanzah)
 Pancasila Telah Dilupakan? (M Dawam Rahardjo)
 Kebudayaan, Masihkah "Dianggap" di Negeri Ini? (Pudentia MPSS)
 Merebut Kembali Kepercayaan Pasar (A Tony Prasetyantono)
 Politik di Arab, Teologi di Indonesia (Hajriyanto Y Thohari)
 Strategi Media Menghadapi MEA (Ignatius Haryanto)
 Diplomasi Parlemen Indonesia (Beginda Pakpahan)
 Gagasan Alur Laut Komunikasi ASEAN (Rene L. Pattiradjawane)

OPINI MINGGU LALU

Cinta (Goenawan Mohamad)
 Palsu (Putu Setia)
 Palsu (Arswendo Atmowiloto)
 Berhala (Sarfito Wirawan Sarwono)
 Revitalisasi Urban (Bre Redana)
 Gosip Joko Wi (Garin Nugroho)
 Merayakan Hidup (Samuel Mullia)
 Bahasa Tubuh dan Pengambilan Keputusan (Sawitri Supardi Sadarjoen)
 John Nash sang Genius (Hotasi Nababan)
 Pijar-Pijar Gagasan Soekarno (Faisal Ismail)
 Kisruh Hukum Praperadilan (Moh Mahfud MD)
 Paradoks Jual Beli Ijazah (Rakhmat Hidayat)
 Beras Palsu dan Spirit Baru Pangan Lokal (Posman Sibuea)
 Daya Saing Infrastruktur Transportasi Darat (Adrianto Djokosoetono)
 FIFA, Korupsi, dan PSSI (Djoko Susilo)
 Angin Segar Industri Baja Ringan?